

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kompleksnya permasalahan pelayanan kesehatan jiwa di Kota Lhokseumawe yang menuntut keterlibatan berbagai sektor, namun kolaborasi lintas sektor yang terbangun belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan perspektif teori **collaborative governance** yang menekankan pentingnya kepercayaan antar aktor, struktur dan aturan kolaborasi, partisipasi yang adil, serta peran kepemimpinan dalam mendukung kerja sama lintas sektor. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, puskesmas, rumah sakit, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan jiwa di Kota Lhokseumawe secara kelembagaan telah melibatkan berbagai aktor melalui koordinasi program, sistem rujukan, pendataan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM), namun secara substantif kolaborasi tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi dan sinkronisasi program antarinstansi, keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman peran lintas sektor, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap ODGJ. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan kesehatan jiwa di Kota Lhokseumawe masih bersifat koordinatif-administratif dan memerlukan penguatan tata kelola kolaborasi yang lebih terstruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen berkelanjutan antarinstansi sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan jiwa di daerah.

Kata Kunci: Kolaborasi,, Aktor, Kebijakan, Pelayanan, Kesehatan Jiwa.